

DAFTAR PUSTAKA

- UUD (2004). *Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Abdul Halim, K. M. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi: akuntansi sektor publik, e2*. Jakarta: salemba empat.
- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba empat.
- Adi. (2006). *Pengoptimalan kapasitas tingkat kemandirian keuangan daerah*. Jakarta.
- Basuki, A. T. (2015). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekoonomi dan Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 1-239.
- Daerah, B. P. (2017). *faktor kemandirian keuangan daerah*.
- A. H. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- D. R. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Erlina, O. S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahlevi, S. S. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/kota di wilayah Aceh)* (Vol. 1). Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2012). *kemandirian keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hotimah, S. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi kasus pada Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Idraningrum, T. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung(studi pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah).skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Konstatinus Pati Sangga, S. B. (2017). *Pengaruh penerimaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening*. Malang (2018): Konsferensi Regional Kuntansi V,.

- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (3 ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusufi, A. H. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusufi, A. H. (n.d.). *Akuntansi Keuangan Daerah* .
- Machfud Sidik, B. R. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era otonomi daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahi, B. R. (2002). "Sejarah transfer keuangan pusat dan daerah". jakarta: kompas.
- MAHMUDI. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta: upp - stim ykpn.
- Mardiasmo. (2002). *Tingkat Investasi Modal terhadap kemandirian keuangan daerah*. Surabaya: STIP.
- Mulyanto. (2007). *Perolehan Aset Belanja Modal* . Jakarta: Salemba Empat.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M. A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salkind, N. J. (2010). *Encyclopedia of Research Design* (Vol. 1).
- Shalihin, D. R. (2017). *Akuntansi Keungan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (kedua ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif jenis data*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian nonprobability sampling*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryo, R. d. (2014). *Bantuan Transfer Dana Alokasi Umum*. Semarang.
- Undang-Undang. (2004). *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Wahyudin, R. I. (2013). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012* (ISSN : 2252-6765 ed., Vol. 3). Accounting Analsys Journal.